

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang diterima

A. Satuan Kerja 05

A.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 kepada Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

A.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

A.3. Program dan Kegiatan

Adapun program Satuan Kerja 05 adalah Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
- b. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Semusim
- c. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Tahunan
- d. Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan
- e. Dukungan Perlindungan Perkebunan
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

A.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9 Realisasi Output Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar		

	a. Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Ha	-
	b. Koordinasi Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao	12 Bulan	12 Bulan
2	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Semusim		
	a. Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim	12 Bulan	12 Bulan
3	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Tahunan		
	a. Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)	6 Laporan	3 Laporan
	b. Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan	4 Ha	0 Ha
	c. Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan	12 Bulan	12 Bulan
4	Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan		
	a. Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan	13 Kabupaten	7 Kabupaten
	b. Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan	13 Kabupaten	13 Kabupaten
	c. Penilaian Usaha Perkebunan	13 Kabupaten	2 Kabupaten
	d. Penerapan Standar Perkebunan Besar/Rakyat Berkelanjutan	13 Kabupaten	5 Kabupaten
5	Dukungan Perlindungan Perkebunan		
	a. Pemberdayaan Perangkat	2 Unit	2 Unit
	b. SL-PHT Perkebunan	4 Kelompok Tani	4 Kelompok Tani
	c. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim	2 Dokumen	2 Dokumen
	d. Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perkebunan	12 Bulan	12 Bulan
No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	a. Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)	12 Bulan	12 Bulan
	b. Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)	12 Bulan	12 Bulan
	c. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya	12 Bulan	12 Bulan

A.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan

Sumber dana Satuan Kerja 05 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan Nomor : DIPA-018.05.3.169066/2014 dan DIPA-018.05.4.169114/2014 tanggal 5 Desember 2013. Adapun jumlah anggaran serta realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 05 Tahun 2014

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Keuangan	
			Realisasi	%
018.05.08	PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN			
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	172.700.000	88.701.700	51,36
1779,002,001	Operasional Laboratorium Lapangan (LL)	119.820.000	79.983.100	66,75
1779,002,004	Operasional Brigade Proteksi Tanaman	52.880.000	8.718.600	16,49
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen perkebunan	1.413.128.000	833.264.575	58,97
1780,008	<i>Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)</i>	100.250.000	79.589.900	79,39
1780,010	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	1.312.878.000	753.674.675	57,41
	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (05) DK	1.585.828.000	921.966.275	58,14
018.05.08	PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN			
1775	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	131,850,000	130,350,000	98,86
1775.032	Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman Rempah dan Penyegar	131,850,000	130,350,000	98,86
1776	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	40.000.000	30,528,600	76,32
1776.021	Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim	40.000.000	30,528,600	76,32
1777	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	1,633,916,000	914,304,000	55,96
1777.015	Revitalisasi perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, karet)	1.471.548.000	890.526.800	60,52
1777,031	Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan	26.068.000	-	0,00
1777,032	Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan	136.300.00	23.777.200	17,44
Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Keuangan	
			Realisasi	%
1778	Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan	568.100.000	245.118.600	43,15
1778,011	Penanganan Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan	310.000.000	173.366.100	55,92
1778,012	Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan	114.980.000	40.018.000	34,80
1778,013	Penilaian Usaha Perkebunan	75.620.000	3.176.000	4,20

1778.014	Penerapan Standar Perkebunan Besar/Rakyat Berkelanjutan	67.500.000	28.558.500	42,31
1779	Dukungan Perlindungan perkebunan	678.534.000	610.813.50	90,02
1779,005	SL-PHT Perkebunan	378.720.000	355.182.000	93,78
1779,011	Antisipasi Dampak Perubahan iklim	59.414.000	32.288.500	54,34
1779,013	Koordinasi Kegiatan perlindungan Perkebunan	240.400.000	223.343.000	92,90
1780	Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen perkebunan	44.997.000	44.891.000	99,76
1780,009	Administrasi Kegiatan dana Tugas Pembantuan (TP)	44.997.000	44.891.000	99,76
	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (05) TP	3.097.397.000	1.976.005.700	63,80
	TOTAL SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (05) DK + TP	4.683.225.000	2.897.971.975	61,88

A.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas di Satuan Kerja 05 berjumlah 6 (enam) orang, berdasarkan :

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tanggal 14 November 2013 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan dana Tugas Pembantu Provinsi tahun 2014.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/011/V-KEU tanggal 8 Januari 2013 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.
- Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/35/Kpts-Disbun/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2014.

Tabel 11 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Gender	Pendidikan			Pangkat		
	S2	S1	SMA	IV	III	II
Pria	0	3	1	0	3	1
Wanita	0	1	1	0	1	1
Jumlah	0	4	2	0	4	2

A.7. Permasalahan dan Solusi

Selama tahun 2014, beberapa permasalahan yang terjadi dalam pencapaian realisasi output kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Belum sinkronnya kegiatan yang ada baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota yang menjadi lokasi kegiatan;
2. SDM yang ada terutama di kabupaten sebagai objek penerima kegiatan masih belum optimal dalam melaksanakan kegiatan yang telah dialokasikan di daerahnya serta masih belum optimalnya dukungan dari Kabupaten terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah;
3. Tingkat kesesuaian dari penyediaan anggaran masih belum sesuai dengan kebutuhan di daerah, seperti satuan biaya untuk operasional lapangan yang masih belum sesuai dengan standar kebutuhan di daerah;
4. Kesiapan CP/CL yang masih belum optimal terutama dalam melaksanakan kegiatan lapangan seperti SL-PHT yang rata-rata sudah pernah dilaksanakan kegiatan SL-PHT terutama bagi petani murni, sedangkan kebutuhan lapangan seharusnya petani tindak lanjut;
5. Untuk kegiatan pertemuan kegiatan lapangan seperti pertemuan Revitalisasi perkebunan di beberapa Kabupaten yang tidak terealisasi, hal ini disebabkan ketidaksiapan SDM di kabupaten untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Hal ini terjadi di beberapa Kabupaten yang telah disediakan anggaran untuk pertemuan Revitalisasi perkebunan seperti Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan (*mengalami penyesuaian anggaran*).

Solusi yang disarankan untuk dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam pencapaian realisasi output kegiatan, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi kegiatan yang ada di Provinsi, Kabupaten maupun Kota.
2. Melakukan Pelatihan terhadap SDM yang ada di Kabupaten, agar dapat mengoptimalkan kegiatan di daerah.
3. Revisi anggaran sesuai kebutuhan daerah.
4. Mematangkan persiapan CP/CL dalam pelaksanaan di lapangan.
5. Memaksimalkan realisasi kegiatan setiap program kerja.

A.8. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Selain Tugas Pembantuan Provinsi, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (Satuan Kerja 05) juga diperoleh oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat dengan realisasi output kegiatan dan anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12 Target Output Kegiatan dan Anggaran Tugas Pembantuan Kabupaten Tahun 2014

Kode	Program dan Kegiatan	Target Output	Pagu Anggaran
DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT			
018.05.08	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan		2.182.607.000
1777	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan		2.074.750.000
1777.001	Pengembangan Tanaman Karet	250 Ha	2.074.750.000
1777.015	Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)	1 Laporan	37.857.000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan		70.000.000
1780.010	Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya	12 Bulan	70.000.000

B. Satuan Kerja 07

B.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan Satuan Kerja 07 kepada Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

B.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja 07 adalah Direktorat Jenderal Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia

B.3. Program dan Kegiatan

Adapun program Satuan Kerja 07 adalah Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Pemasaran Domestik
- b. Pengembangan Usaha dan Investasi
- c. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

B.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan pameran-pameran yang diikuti dengan pembiayaan dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, sebagai berikut :

- Agro Product and Tecnology Expo (APTEX)
- Surabaya Agribusiness Matching dan Expo (Samex) di Surabaya

B.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan

Sumber dana Satuan Kerja 07 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan Nomor : DIPA-018.07.3.169003/2014 dan DIPA-018.07.4.169116/2014 tanggal 5 Desember 2013. Adapun jumlah anggaran serta realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 07 Tahun 2014

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Keuangan	
			Realisasi	%
018.07.10	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN			
1789	Pengembangan Pemasaran Domestik	37.700.000	26.046.000	69,09
1789.004	Pengembangan PIP Agribisnis	37.700.000	26.046.000	69,09
1791	Pengembangan Usaha dan Investasi	101.000.000	98.763.100	97,79
1791.003	Pameran, Promosi, Eksepsi dan Perlombaan Dalam Negeri Maupun Luar Negeri	101.000.000	98.763.100	97,79
1792	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	288.900.000	222.829.200	77,13
1792.006.003	Pengolahan Hasil Perkebunan	54.500.000	41.540.200	76,22
1792.006.010	Administrasi, Koordinasi Dan Pembinaan	234.400.000	181.289.000	66,89
	Jumlah DK	427.600.000	347.638.300	81,30
018.07.10	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN			
1792	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	556.400.000	497.349.700	89,39
1792.003.001	Unit Usaha Pengolahan hasil perkebunan	250.000.000	234.221.850	93,69

1792.003.004	<i>Fasilitas Agroindustri Perkebunan Kelapa</i>	256.400.000	232.509.850	90,68
1792,006	<i>Laporan Kegiatan dan Pembinaan</i>	50.000.000	30.618.000	61,24
	Jumlah TP	556.400.000	497.349.700	89,39
	Total DK + TP	984.000.000	844.988.000	85,87

B.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas di Satuan Kerja 07 berjumlah 15 (lima belas) orang, berdasarkan :

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5156/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/012/V-KEU/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Susunan Personil Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.
- Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/71/Kpts-Disbun/2014 tanggal 13 Februari 2014 dan 188.4/21/Satker-07/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi pelaksana Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (07) Tahun Anggaran 2014.

Tabel 14 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Gender	Pendidikan			Pangkat		
	S2	S1	SMA	IV	III	II
Pria	0	5	5	0	8	2
Wanita	1	3	1	1	3	1
Jumlah	1	8	6	1	11	3

C. Satuan Kerja 08

C.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan Satuan Kerja 08 kepada Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

C.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja 08 adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia

C.3. Program dan Kegiatan

Adapun program Satuan Kerja 08 adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
- b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

C.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja 08 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 15 Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 08 Tahun 2014

Kegiatan	Kabupaten/Kota	Realisasi Fisik	Komoditi
Perluasan Areal	Bulungan	50 Ha	Karet
Pengembangan Sumber Air Mendukung Perkebunan	Bulungan	1 Paket	
Pengembangan Embung	Kutai Kartanegara	48 Unit	
	PPU	48 Unit	

C.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan

Sumber dana Satuan Kerja 08 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan Nomor : DIPA-018.08.3.169004/2014 dan DIPA-018.08.4.169119/2014

tanggal 5 Desember 2013. Adapun jumlah anggaran serta realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 08 Tahun 2014

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Keuangan	
			Realisasi	Keu %
1	2	3	4	5
018.08.11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk pertanian	1.287.200.000	965.040.770	74,97
1794.994.001	Supervisi dan Pembinaan	60.800.000	46.413.400	76,34
011	Supervisi dan Pembinaan Aspek Air	60.800.000	46.413.400	76,34
1795	Perluasan Areal dan Pengelolaan lahan pertanian	68.000.000	44.128.100	64,89
1795.994.001	Supervisi dan Pembinaan	68.000.000	44.128.100	64,89
011	Supervisi dan Aspek Lahan	68.000.000	44.128.100	64,89
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	22.000.000	13.430.000	61,05
1796.994.001	Supervisi dan Pembinaan	22.000.000	13.430.000	61,05
011	Supervisi dan Pembinaan Aspek Alsintan	22.000.000	13.430.000	61,05
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	275.200.000	116.077.970	42,18
1797.994.001	Administrasi Perkantoran	275.200.000	116.077.970	42,18
011	Administrasi kegiatan di Provinsi	154.200.000	68.140.900	44,19
012	Dukungan Manajemen dan Kegiatan Ditjen TA. 2014	121.000.000	47.937.070	39,62
3993	Fasilitas Pupuk dan Pesticida	12.000.000	8.430.000	70,25
3993.994.001	Supervisi dan Pembinaan	12.000.000	8.430.000	70,25
011	Supervisi dan Pembinaan Aspek Pupuk Pesticida	12.000.000	8.430.000	70,25
3994	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)	12.000.000	-	0,00
3994.994.001	Supervisi dan Pembinaan	12.000.000	-	0,00
011	Supervisi dan Pembinaan Aspek Pembiayaan	12.000.000	-	0,00
Jumlah DK		450.000.000	228.479.470	50,77
018.08.11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	300.000.000	300.000.000	100,00
1794.001.003	Pengembangan Sumber Air Mendukung Perkebunan	60.000.000	60.000.000	100,00
011	Pengembangan Sumber Air Mendukung Perkebunan	60.000.000	60.000.000	100,00
1794.022.003	Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung perkebunan	240.000.000	240.000.000	100,00
A	Kabupaten Kutai Kartanegara	120.000.000	120.000.000	100,00

B	Kabupaten Penajam Paser Utara	120.000.000	120.000.000	100,00
1795	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian			
1795.002.003	Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Perkebunan	84.000.000	-	0,00
1795.028.002	Perluasan Areal Perkebunan	350.000.000	350.000.000	100,00
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			
1797.994.001	Pembinaan Administrasi Kegiatan di Kabupaten/Kota	85.000.000	70.461.800	82,90
011	Kabupaten Bulungan	35.000.000	29.661.800	84,75
A	Pembinaan Administrasi dan Teknis Kabupaten	24.000.000	22.420.000	93,42
B	Perencanaan Program dan Kegiatan PSP	1.400.000	-	0,00
C	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen PSP TA. 2014	1.600.000	-	0,00
D	Pengawasan, sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Teknis Ditjen PSP TA. 2014	8.000.000	7.241.800	90,52
025	Kabupaten Kutai Kartanegara	25.000.000	19.600.000	89,50
A	Pembinaan Administrasi dan Teknis Kabupaten	21.900.000	19.600.000	89,50
B	Perencanaan Program dan Kegiatan PSP	700.000	-	0,00
C	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen PSP TA. 2014	800.000	-	0,00
D	Pengawasan, sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Teknis Ditjen PSP TA. 2014	1.600.000	-	0,00
026	Kabupaten Penajam Paser Utara	25.000.000	21.200.000	84,80
A	Pembinaan Administrasi dan Teknis Kabupaten	21.900.000	19.600.000	89,50
B	Perencanaan Program dan Kegiatan PSP	700.000	-	0,00
C	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen PSP TA. 2014	800.000	-	0,00
D	Pengawasan, sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Teknis Ditjen PSP TA. 2014	1.600.000	1.600.000	100,00
1797.994.002	Administrasi Pengelola Dana Tugas Pembantu di Provinsi	18.200.000	16.099.500	88,46
011	Administrasi Kegiatan	18.200.000	16.099.500	88,46
Jumlah TP		837.200.000	736.561.300	87,98
Total DK + TP		1.287.200.000	965.040.770	84,93

C.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas di Satuan Kerja 08 berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, berdasarkan :

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/OT.160/04/2013 tanggal 2 April 2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4600/Kpts/KU.410/II/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/012/V-KEU/2014 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementrian Pertanian Republik Indonesia pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.
- c. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/70/Kpts-Disbun/2014 tentang Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta pelaksana Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (08) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014.

Tabel 17 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Gender	Pendidikan			Pangkat		
	S2	S1	SMA	IV	III	II
Pria	4	5	3	1	6	5
Wanita	2	5	2	2	4	3
Jumlah	6	10	5	3	10	8

C.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan di dalam pencapaian realisasi kegiatan di Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif ada di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Bulungan seluas 50 ha.
- Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan seluas 50 ha di desa Jelesai km 9 kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- SDM yang ada terutama di kabupaten sebagai objek penerima kegiatan masih belum optimal dalam melaksanakan kegiatan yang telah dialokasikan di kabupaten serta masih belum optimalnya dukungan dari Kabupaten terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah;
- Tingkat kesesuaian dari penyediaan anggaran masih belum sesuai dengan kebutuhan di daerah, seperti satuan biaya untuk operasional lapangan yang masih belum sesuai dengan standar kebutuhan di daerah;
- Kesiapan CP/CL yang masih belum optimal terutama dalam melaksanakan kegiatan lapangan seperti SL-PHT yang rata-rata sudah pernah dilaksanakan

kegiatan SL-PHT terutama bagi petani murni, sedangkan kebutuhan lapangan seharusnya petani tindak lanjut;

Solusi yang disarankan untuk dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam pencapaian realisasi output kegiatan, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi kegiatan yang ada di Provinsi, Kabupaten maupun Kota.
2. Melakukan Pelatihan terhadap SDM yang ada di Kabupaten, agar dapat mengoptimalkan kegiatan di daerah.
3. Revisi anggaran sesuai kebutuhan daerah.
4. Mematangkan persiapan CP/CL dalam pelaksanaan di lapangan.
5. Memaksimalkan realisasi kegiatan setiap program kerja.